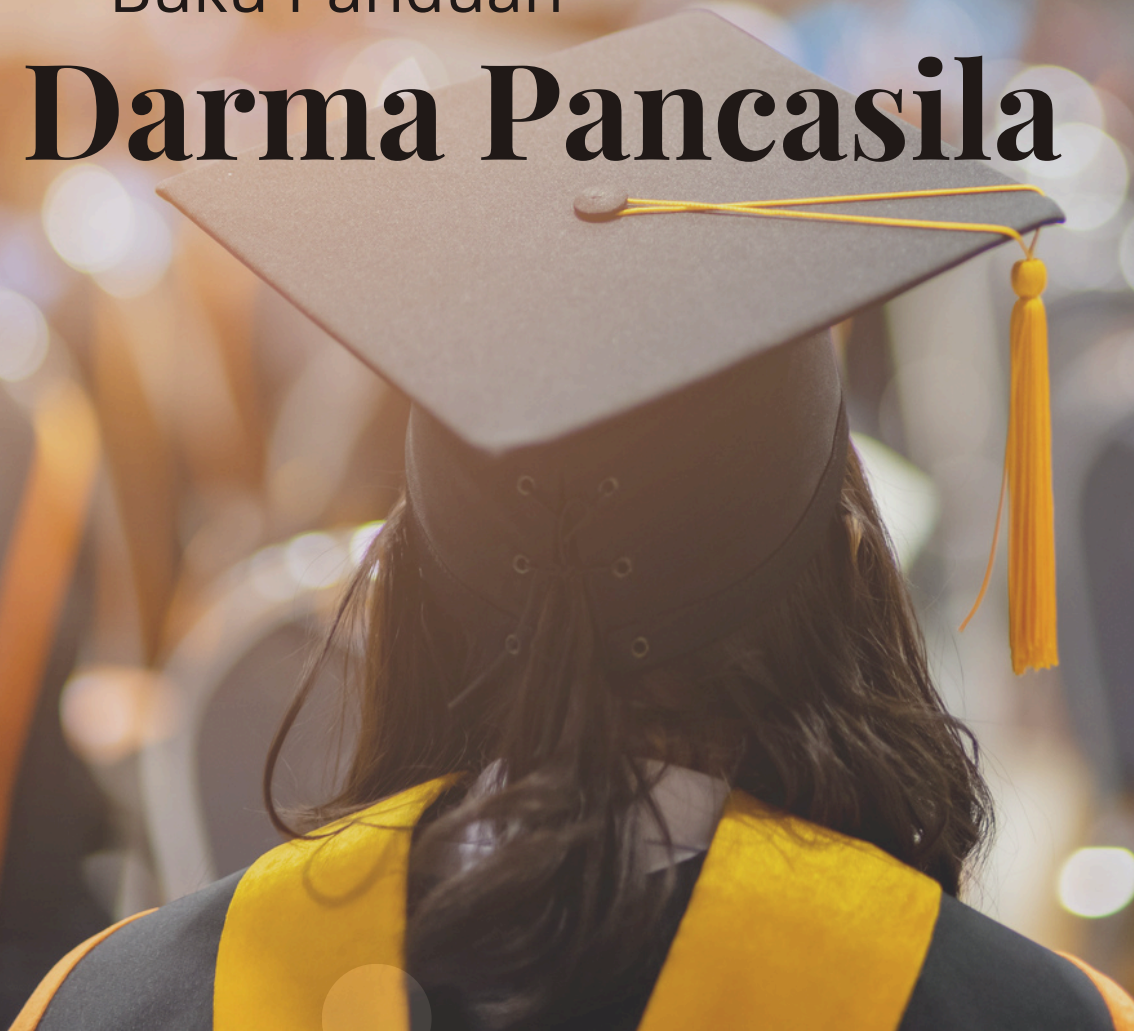


Buku Panduan

# Dana Darma Pancasila



Riset Master  
Riset Doktorat  
**2024**

## Deskripsi Singkat

Dana Darma Pancasila merupakan program bantuan dana yang diinisiasi oleh Aliansi Kebangsaan. Program ini adalah bentuk dukungan kepada kalangan intelektual dalam rangka pengembangan kajian keilmuan yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila (tata nilai, tata kelola, tata sejahtera). Di tahap awal, program ini fokus pada bantuan dana untuk bidang penelitian, yaitu tugas akhir Mahasiswa Pasca Sarjana. Kedepannya, bantuan ini akan diberikan ke berbagai bidang seperti inovasi teknologi, inkubasi bisnis dan lain-lain.





PROGRAM

**DANA** 2024  
—  
2025

**DARMA**  
Pancasila

Buku  
Panduan

# Daftar Isi

Pelajari dengan baik petunjuk-  
petunjuk dalam Buku Panduan ini.  
Pastikan kamu memahaminya.

## Pengantar

Pengantar Penerbitan	2
Sambutan Ketua	3
Aliansi Kebangsaan	

## Tiga Ranah Pancasila

Memahami Konsepsi Tiga Ranah Pancasila	6
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan	10

## Tentang Program

Deskripsi Program	12
Kriteria dan Persyaratan	13
Tata Cara Pendaftaran	14
Alur Pendaftaran	15
Timeline Program	16
Tim Program	17

## Lampiran

Surat Kesanggupan Penelitian	18
Surat Pertanggungjawaban	18
Surat Rekomendasi	18

## Penutup

Kata Penutup	22
Podcast Tiga Ranah Pancasila	23





# Dana Darma Pancasila

## KATA PENGANTAR

Buku Panduan ini disusun sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang memiliki minat pada program bantuan Dana Darma Pancasila dari Aliansi Kebangsaan. Buku ini memuat penjelasan singkat mengenai konsep Tiga Ranah Pancasila sebagai sebuah kerangka paradigmatis akademik dalam memahami problematika bangsa.

Tujuan diterbitkannya buku panduan ini untuk memudahkan calon penerima bantuan melakukan penyesuaian topik kajian penelitian tugas akhirnya baik Tesis maupun Disertasi. Kemudian, buku ini juga memuat kriteria dan persyaratan calon pelamar, tata cara pendaftaran serta jadwal terkait program Dana Darma Pancasila.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi panduan sekaligus mengundang pihak-pihak yang berminat untuk mengajukan proposal penelitian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta kerjasamanya demi terselenggaranya Program Dana Darma Pancasila ini.

Jakarta, Maret 2024

**AHMAD ZACKY SIRADJ**  
Sekjen Aliansi Kebangsaan



Kata Sambutan  
Ketua Aliansi Kebangsaan  
*Pontjo Sutowo*



# Mengarusutamakan Pancasila melalui Inisiatif ‘Dana Darma Pancasila’



Aliansi Kebangsaan adalah jaringan intelektual lintas-kultural dan lintas-keyakinan yang dipersatukan oleh kepedulian yang sama untuk mengembangkan kebangsaan Indonesia yang berperadaban, dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional—menjadi bangsa yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Kami percaya bahwa tak ada kebangkitan dan kemajuan tanpa diusahakan secara sengaja dan penuh kesadaran. Lewat pengalaman sejarah perjuangan bangsa, kita bisa melihat bahwa usaha menumbuhkan kesadaran itu memerlukan “fajar budi” (keutamaan budi), yang dapat menyatukan pikiran, perasaan dan kemauan dalam spirit kolektif.

Dalam kaitan itu, peran intelektual sangat menentukan dan selalu menjadi pemantik gerakan kemajuan, kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia.

Pengalaman masa lalu bisa menjadi lilin kecil untuk menyinari perjalanan bangsa ke depan. Memang benar, tak ada seorang pun yang bisa mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Akan tetapi, memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan lebih baik daripada tidak mempersiapkan sama sekali. Untuk itu, pengetahuan tentang masa lalu dapat membantu memahami masa depan. Tanpa pelajaran dari masa lalu, perjalanan ke depan ibarat memasuki lorong sunyi kegelapan.

**Berangkat dari kehendak untuk turut mengarusutamakan epistemologi Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional, Aliansi Kebangsaan mencoba mengambil bagian dengan meluncurkan inisiatif “Dana Darma Pancasila”.**

Dalam mengarungi perjalanan bangsa ke depan, perjuangan mewujudkan politik harapan harus berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Harapan tanpa visi bisa mengarah pada kesesatan. Visi tersebut harus mempertimbangkan warisan terbaik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuannya untuk mengantisipasi masa depan.

Visi transformatif yang diharapkan itu demi keampuannya perlu meletakkan pembangunan dalam kerangka kerja perkembangan peradaban. Bahwa pembangunan nasional itu pada hakekatnya merupakan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama peradaban: ranah mental-kultural (tata nilai), ranah institusional-politikal (tata kelola), dan ranah material-teknologikal (tata sejahtera).

Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-kultural (tata nilai) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal (tata kelola) basis utamanya sila keempat. Ranah material-tenologikal (tata sejahtera) basis utamanya sila kelima. Ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memiliki kapasitas untuk menjadi acuan paradigma pembangunan nasional.

Segala idealitas wawasan Pancasila itu baru bisa memperoleh kepenuhan artinya bila mampu diwujudkan dalam realitas kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Untuk itu, Pancasila sebagai dasar filosofi negara (Philosophische Grondslag) menghendaki pemenuhan tiga dimensi filsafat (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) yang bertaut dengan tiga dimensi ideologi (keyakinan, pengetahuan, dan tindakan).

1

*“Pancasila seyogianya tak berhenti sebatas keyakinan-ontologis, melainkan harus diturunkan menjadi paradigma epistemologis sebagai jembatan bagi perwujudan tindakan aksiologis.”*

Dalam kaitan itu, Pancasila seyogianya tak berhenti sebatas keyakinan-ontologis, melainkan harus diturunkan menjadi paradigma epistemologis sebagai jembatan bagi perwujudan tindakan aksiologis. Perwujudan Pancasila sebagai paradigma epistemik Pembangunan Nasional pada gilirannya memerlukan prasyarat kecerdasan, pemahaman dan pengkajian yang mendalam.

Proses objektivikasi Pancasila memerlukan berbagai kerangka teori pengetahuan sebagai turunan dari epistemologi Pancasila. Dan untuk memperkaya khasanah pengetahuan teoritik itu bisa dilakukan dengan melakukan kerja penelitian secara berkesinambungan, yang memadukan antara riset lapangan dan riset literatur komparatif—dengan menelaah berbagai karya ilmiah dari sumber mana pun dan disiplin ilmu apa pun yang senafas dan dapat memperkuat epistemologi Pancasila.

Berangkat dari kehendak untuk turut mengarusutamakan epistemologi Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional, Aliansi Kebangsaan mencoba mengambil bagian dengan meluncurkan inisiatif “Dana Darma Pancasila”. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memberi bantuan dana penelitian dan kerja ilmiah dalam isu-isu yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila (tata nilai, tata kelola, tata sejahtera). Untuk pertama kali, bantuan ini diberikan kepada mahasiswa pasca-sarjana (S2 dan S3) yang akan melakukan penelitian untuk menulis tesis dan disertasi.



Semoga rintisan inisiatif ini bisa merangsang berbagai pihak untuk ikut terlibat --sebagai pengguna maupun pemberi bantuan dana, atau pun bentuk-bentuk partisipasi lainnya, sebagai ikhtiar untuk mengarusutamakan Pancasila dalam Pembangunan Nasional. Sebuah katalis yang diperlukan sebagai jembatan objektivikasi Pancasila dalam mewujudkan perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Jakarta, 7 Februari 2024

Ketua Aliansi Kebangsaan  
Pontjo Sutowo

# Memahami

# Konsep Tiga Ranah

# Pancasila

Pembangunan nasional adalah gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional berlandaskan (kerangka keyakinan, pengetahuan dan tindakan) Pancasila. Laju pembangunan dalam kerangka transformasi peradaban itu sekarang menghadapi tantangan yang serius dari penderasan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa serta perubahan-perubahan tata nilai, tata kelola, dan tatanan material dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sementara itu, respon yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut terkendala oleh kesibukan kontestasi politik jangka pendek, yang cenderung mengabaikan persoalan pembangunan fundamental yang berjangka panjang.







Untuk itu, harus ada kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.[1]

Dalam kaitan itu, perlu diingatkan bahwa bahwa hakikat Pembangunan Nasional itu sesungguhnya merupakan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan sosial: ranah mental-spiritual, ranah institusional-politikal, dan ranah material-teknologikal. Ranah pertama kerap disebut sebagai ranah budaya, sedang ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah peradaban. Meski demikian, lazim pula dipahami, bahwa dalam istilah peradaban pun terkandung basis nilai budaya. Oleh karena itu, ketiga ranah tersebut bisa disebut dalam satu tarikan nafas sebagai ranah peradaban.

Penjelasan tentang ranah mental-spiritual bisa meminjam argumentasi dari Arnold Toynbee dan (1947) dan Oswald Spengler (1991). Dalam bukunya, *A Study of History*, Toynbee melakukan pelacakan terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban, dengan kesimpulan yang mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Hal senada dikemukakan oleh Spengler. Dalam bukunya, *The Decline of the West*, ia menengarai kemunduran peradaban Barat disebabkan oleh pudarnya “jiwa” budaya (spirit, etos, etika, mindset) yang menjadi elan vital peradaban.

Penjelasan tentang ranah institusional-politikal antara lain dikemukakan oleh Daren Acemoglu dan James A. Robinson. Dalam karya bersamanya, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (2012), keduanya menengarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara-bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumberdaya, melainkan karena salah urus, alias salah desain kelembagaan dan tata-kelola pemerintahan.

Penjelasan tentang ranah material-teknologikal diajukan oleh banyak pemikir. Bahwa ide dan peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan (sumberdaya) material dan teknologi akan kuat mempengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Menurut Toynbee, semakin tinggi teknologi sebuah peradaban, makin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain. Lebih dari itu, para pemikir lintas zaman dan lintas mazhab, meski dengan perspektif yang berbeda-beda, menunjukkan kesamaan kepedulian terhadap pentingnya memperhatikan keadilan material.[1] Para pemikir utilitarian seperti Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan umum (the greatest happiness of the greatest number) sebagai basis ketahanan dan kebajikan sosial.

## PANCASILA DAN TIGA RANAH PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Ranah material-tenologikal basis utamanya sila kelima. Dalam kerangka Pancasila, ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, orientasi dari ketiga ranah kehidupan sosial tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan mental-spiritual diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepribadian (berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu mengembangkan hubungan welas asih dengan “Yang Mahasuci”, yang memancarkan semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran; welas asih dengan sesama manusia, yang memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab; welas asih dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang memancarkan semangat persatuan dalam keragaman bangsa. Dengan spirit Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan daya-daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong-royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

2. Pengembangan institusi sosial-politik diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utamanya berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan); yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

3. Pengembangan ranah material-teknologikal diarahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkejahteraan umum dengan nilai utamanya berlandaskan sila kelima. Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat koperatif), disertai pengusaan negara atas "karunia kekayaan bersama" (commonwealth) serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya, ketiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara simultan diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa: terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.

## TIGA AGEN TRANSFORMASI SOSIAL

Pengembangan ketiga ranah tersebut memerlukan keandalan tiga agen sosial: rejim pendidikan dan pengetahuan, rejim politik-kebijakan, rejim ekonomi-produksi. Dalam konteks persoalan Indonesia hari, ketiga rejim mengemban prioritas tugas sebagai berikut.

Prioritas rejim pendidikan dan pengetahuan adalah membenahi aspek mental-spiritual dengan merevitalisasi pendidikan budi pekerti, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Budi mengandung arti "pikiran, perasaan dan kemauan"; pekerti artinya "tenaga". Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan tekad-kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat melahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Dengan pendidikan budi-pekerti diharapkan mampu melahirkan generasi baru Indonesia yang berkarakter dan kreatif dengan jiwa merdeka.

Prioritas rejim politik-kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola budaya (mental-spiritual), tata kelola sumberdaya material dan teknologi, serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintahan, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa diantaranya menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum (nomokrasi) yang dapat menopang kesehatan demokrasi, persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembangunan) yang lebih solid, persoalan tumpang-tindih kewenangan insitusi-institusi negara, terlalu luasnya cakupan kelembagaan negara karena kehadiran beragam komisi negara serta pentingnya perampingan birokrasi negara untuk menghindari jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representatif dengan kesanggupan mengakomodasi segala kekuatan sosial-politik, serta pentingnya memperbaiki rejim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong-royong.

Prioritas rejim ekonomi-produksi adalah mengembangkan semangat tolong-menolong (kooperatif) dalam perekonomian. Politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan bersama (commonweath) serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan teknologi, dengan memprioritaskan pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakteristik (kondisi) keindonesiaan.[1] Untuk itu, pengembangan teknologi harus beringsut dari lembaga riset negara menuju ranah industri-perusahaan; terintegrasi ke dalam sektor produktif.

## PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Dengan demikian, Pembangunan Nasional menurut visi Pancasila adalah fungsi dari pembangunan mental-spiritual ditambah fungsi institusional-politikal serta fungsi material-teknologikal (pembangunan nasional = pembanguan mental-spiritual + institusional-politikal + material-teknologikal).

Pancasila bisa dijadikan tolok ukur paradigmatik untuk mengembangkan dan menguji sistem Pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai gatra ideologi tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, melainkan berdiri di atas (mengatasi) gatra-gatra lainnya.

Taraf pembangunan dan ketahanan Nasional di berbagai gatra tersebut bisa diukur berdasarkan imperatif Pancasila dalam ranah mental-spiritual, institusional-politikal, serta material-teknologikal. Dengan demikian, setiap gatra bisa dilihat kondisi ketahanan mental-spiritualnya, kondisi institusional-kebijakannya, serta kondisi material-teknologinya.

Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan framework (panduan dan haluan) yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, penancangan program kerja, serta pilihan kebijakan dalam kerangka memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional itu sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan. Selain pemerintah, kaum intelektual, pemuka agama, seniman, masyarakat media, masyarakat sipil, pemangku adat dan lain-lain bisa melakukan pengisian dan pengembangan terhadap Pancasila sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing.

Dalam pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur bagi segala komponen bangsa untuk menakar apakah kebijakan-kebijakan negara dan praktik kehidupan kebangsaan sesuai atau tidak dengan imperatif-imperatif Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi alat kritik sekaligus panduan bagi kebijakan negara serta perilaku aparatur negara dan warga negara.

Dengan cara-cara seperti itulah, idealitas Pancasila bisa bergerak mendekati realitas. Tes terakhir dari keampuhan Pancasila teruji ketika setiap sila dan konsepsinya bisa dibumikan dalam kenyataan semesta Pembangunan.



## I. DESKRIPSI PROGRAM

---

# Dana Darma Pancasila

(Bidang Penelitian)

### **Pengertian**

Program Dana Darma Pancasila bidang penelitian merupakan program bantuan dana yang diberikan oleh Aliansi Kebangsaan sebagai bentuk dukungan kepada kalangan intelektual dalam pengembangan kajian yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila (tata nilai, tata kelola, tata sejahtera).

### **Tujuan dan Manfaat Dana Darma Pancasila**

- Menumbuhkan para pemikir untuk memperadabkan bangsa.
- Memberikan dukungan kepada para intelektual untuk mengembangkan kajian yang berfokus pada pemikiran Pancasila.
- Mendorong tumbuhnya perkembangan kajian tentang Pancasila di tiga ranah, yaitu ranah Tata Nilai, Tata Kelola, dan Tata Sejahtera.

## II. KRITERIA DAN PERSYARATAN

---

### Bantuan Dana Penelitian

Program bantuan ini diberikan untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sedang menjalani tugas akhir (Tesis/Disertasi) dengan tema penelitian yang berkaitan dengan Tiga Ranah Pancasila, baik yang mencakup ranah yaitu Ranah Tata Nilai, Ranah Tata Kelola, dan Ranah Sejahtera.

Kriteria:

1. Mahasiswa S2/S3 yang sedang menjalani tugas akhir.
2. Melampirkan KTP.
3. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan melampirkan KHS/transkrip nilai terakhir dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00.
5. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan dana dari lembaga lainnya.
6. Bersedia menyelesaikan tugas akhir (Tesis/Disertasi) dalam jangka waktu maksimal 1 tahun untuk tesis dan 3 untuk disertasi.

Persyaratan:

1. Melampirkan Proposal Penelitian hasil sidang/seminar proposal dengan tema kajian yang berkaitan pada Tiga Ranah Pancasila.
2. Terbukti telah lolos sidang proposal dengan melampirkan surat persetujuan dari penguji sidang dan pembimbing Tesis/Disertasi atau berita acara sidang/seminar proposal.
3. Melampirkan surat penelitian dari Universitas.
4. Melampirkan rincian rencana anggaran biaya penelitian.
5. Melampirkan dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan tugas akhir (Tesis/Disertasi) dalam jangka waktu maksimal 1 tahun untuk tesis dan 3 untuk disertasi. (format terlampir).
6. Melampirkan surat rekomendasi dari supervisor/promotor (format terlampir).
7. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan dana dari lembaga lainnya (format terlampir).
8. Menuliskan "surat motivasi" yang menjelaskan tentang:
  - a. Alasan mengikuti program
  - b. Topik penelitian
  - c. Alasan mengapa layak mendapatkan bantuan dana penelitian

### III. TATA CARA PENDAFTARAN, JADWAL, DAN ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

---

#### ALUR SELEKSI

1. Administratif
2. Wawancara
3. Pelatihan



”

#### TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran dapat diakses pada laman:

<https://aliansikebangsaan.org>



Para pelamar diharapkan untuk memperhatikan betul segala kelengkapan administratif yang diperlukan sebagaimana tercantum pada laman Aliansi Kebangsaan. Seluruh proses pengiriman dokumen dilakukan secara online melalui unggah dokumen. Jika terdapat masalah pada proses unggah dokumen dapat mengirimkan email tertera.

**“Education is not received. It is achieved.”**  
(Albert Einstein)

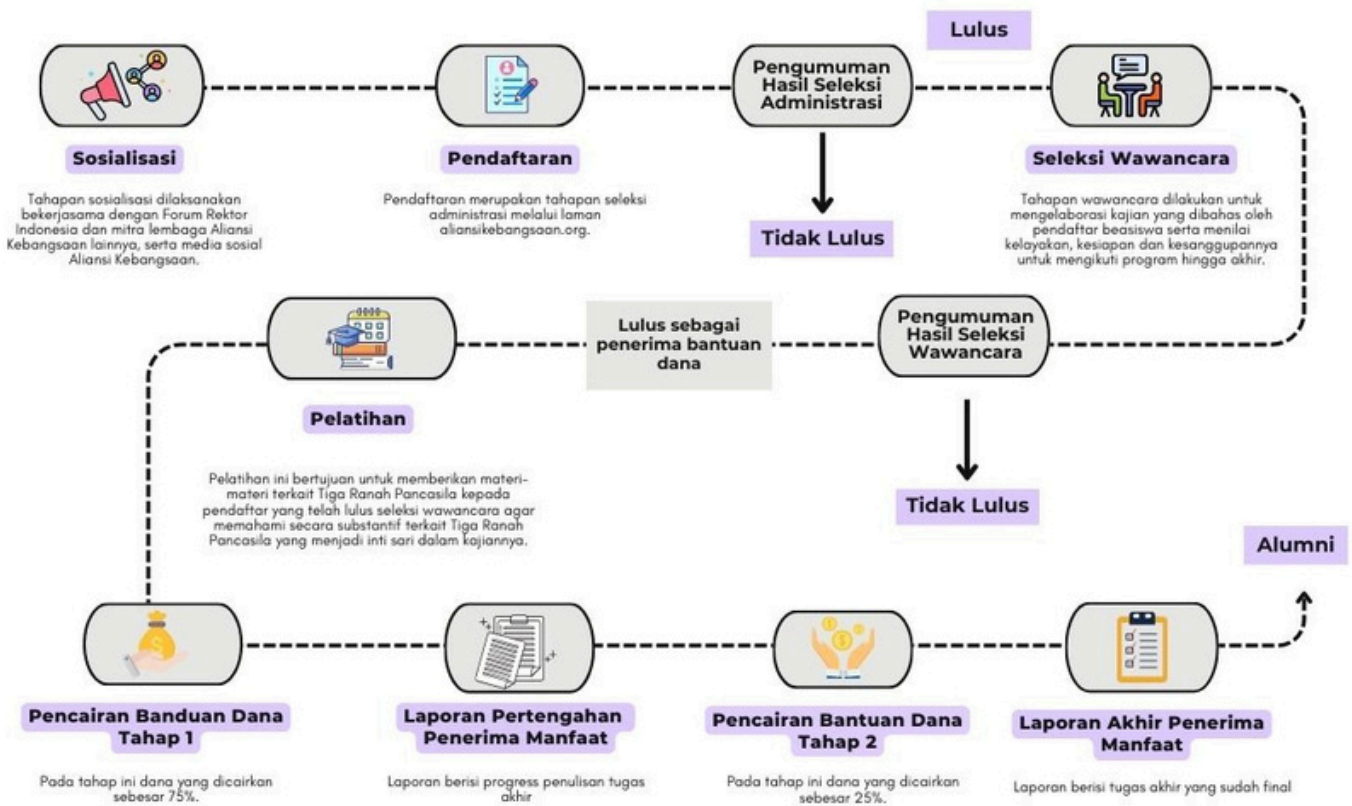
---



# IV. Alur Pendaftaran Bantuan Dana Penelitian



## ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA DARMA PANCASILA ALIANSI KEBANGSAAN BANTUAN DANA PENELITIAN TUGAS AKHIR (TESIS/DISERTASI)



# TIMELINE

## JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM BATCH 1

1 APRIL – 31 MEI 2024  
PENDAFTARAN

JUNI 2024  
SELEKSI TAHAP 1

JUNI 2024  
PENGUMUMAN HASIL  
SELEKSI TAHAP 1

JULI 2024  
SELEKSI TAHAP 2

JULI 2024  
HASIL SELEKSI TAHAP 2

8 – 15 JULI 2024  
PELATIHAN TIGA RANAH  
PANCASILA

AGUSTUS 2024  
PENCAIRAN DANA TAHAP 1

# Tim Program



**Prasetijono Widjojo**  
*Pengarah Program*



**Yudi Latif**  
*Ketua Tim Seleksi*



**Wisnubroto**  
*Anggota Tim Seleksi*



**Manuel Kaisiepo**  
*Anggota Tim Seleksi*



**I Dewa Putu Rai**  
*Anggota Tim Seleksi*



**Irma Khairani**  
*Sekretaris Program*



**Nofia Fitri**  
*Manajer Program*



**Susetya Herawati**  
*Anggota Tim Seleksi*

# LAMPIRAN SURAT

01

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN  
PENELITIAN BANTUAN DANA PENELITIAN DISERTASI  
(TERLAMPIR PADA WEBSITE ALIANSI KEBANGSAAN).

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN  
PENELITIAN BANTUAN DANA PENELITIAN TESIS  
(TERLAMPIR PADA WEBSITE ALIANSI KEBANGSAAN).

02

03

SURAT REKOMENDASI  
(TERLAMPIR PADA WEBSITE ALIANSI KEBANGSAAN)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
BANTUAN DANA PENELITIAN TESIS/DISERTASI  
(TERLAMPIR PADA WEBSITE ALIANSI KEBANGSAAN).

04

# Penutup

Aliansi Kebangsaan sangat berharap Program bantuan penelitian Dana Darma Pancasila dapat semakin memperkaya khasanah penelitian tentang Pancasila di berbagai institusi perguruan tinggi. Khususnya, dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya kajian-kajian yang memperdalam pemahaman serta realisasi Pancasila di tiga ranah, yaitu ranah Tata Nilai, Tata Kelola, dan Tata Sejahtera.

Buku panduan ini menjelaskan tentang jenis, kriteria dan persyaratan, dan mekanisme pendaftaran program Dana Darma Pancasila secara padat dan rinci. Harapannya, buku panduan ini dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait, terutama bagi para calon pendaftar penerima manfaat dalam proses melakukan pendaftaran program Dana Darma Pancasila.

# PODCAST TIGA RANAH PANCASILA



Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya yang ke-12, Aliansi Kebangsaan, bekerjasama dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dan Forum Komunikasi Putra Putri TNI-POLRI, telah meluncurkan program podcast berjudul *Tiga Ranah Pancasila*, Saatnya Cendekiawan Bicara. Serial Podcast ini berbicara tentang bagaimana mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan paradigma Pancasila melalui tiga ranah sosial, yakni mental-kultural atau tata-nilai, institusional-politikal atau tata-kelola, dan ranah material-teknologikal atau tata-sejahtera.

Ketiga ranah sosial pembangunan tersebut merupakan rangkuman pemikiran para cendekiawan dan kaum cerdik pandai dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, dari serial diskusi *"Mewujudkan Kebangsaan yang Berperadaban dengan Paradigma Pancasila"*, yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan bersama Forum Rektor Indonesia dan sejumlah mitra strategis lainnya selama dua setengah tahun, sejak Maret 2019.

Ranah mental-kultural atau tata-nilai, berbicara tentang bagaimana memajukan kebudayaan dan peradaban bangsa, dengan membangun manusia Indonesia yang inklusif dalam segala aspek kehidupannya.

Ranah institusional-politikal atau tata-kelola, berbicara tentang bagaimana penataan sistem demokrasi, hukum, dan politik, dalam kerangka persatuan nasional untuk menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat.

Ranah material-teknologikal atau tata-sejahtera, tentang bagaimana penguasaan pengembangan inovasi teknologi berbasis potensi Indonesia, dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Saksikan di YouTube Podcast Tiga Ranah Pancasila.



KUNJUNGI LAMAN KAMI:



**WWW.ALIANSIKEBANGSAAN.ORG**



Buku Panduan

# Dana Darma Pancasila

“Perjalananmu dimulai dari karya”

HUBUNGI KAMI



**Irma Khairani**

**WA +6289531921372**

[irma.alianskebangsaan@gmail.com](mailto:irma.alianskebangsaan@gmail.com)